



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) LPMP RIAU TAHUN 2018

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Riau telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja LPMP Riau tahun 2018. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala LPMP Riau atas pelaksanaan tugas dan fungsinya menopang tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), yang selanjutnya diatur dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP yang diperkuat dengan Rincian Tugas LPMP.

LAKIP tahun 2018 merupakan laporan akuntabilitas kinerja untuk periode perencanaan tahun 2015-2019. Laporan akuntabilitas kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis LPMP Riau sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2018 .

LPMP Riau sadar masih belum maksimal dalam memperoleh capaian peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau. Hal ini disebabkan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja LPMP Riau pada tahun 2018. Selain itu, laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan pada tahun mendatang. Untuk penyempurnaan LAKIP LPMP Riau tahun 2018 ini, diharapkan sumbangan saran, pemikiran, dan kritikan yang bersifat membangun. Sehingga dapat menjadikan LAKIP LPMP Riau tahun 2018 lebih baik dan lebih sempurna, sesuai dengan yang diharapkan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan akuntabilitas kinerja tahun 2018 LPMP Riau.

Pekanbaru, Januari 2019
Kepala LPMP Riau,

Drs. Mulyatsyah, MM
NIP. 196407141993041001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	5
D. Tugas dan Fungsi	5
E. Struktur Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Visi, Misi dan Tata Nilai LPMP Riau	9
B. Tujuan dan Sasaran Strategis LPMP Riau	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
BAB IV PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran	67

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Riau sebagai Unit Eselon III Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan berbagai kegiatan tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsi yang meliputi kegiatan-kegiatan dan program penjaminan mutu pendidikan di tingkat propinsi. LPMP Riau melaporkan capaian kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) program yang mendukung hasil tersebut. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada program/kebijakan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran lembaga. Laporan ini menyatakan capaian kinerja lembaga sesuai dengan kebijakan dalam sasaran dan tujuan strategis dari rencana strategis LPMP Riau .

LPMP Riau, sesuai dengan tugas dan fungsi, melaksanakan layanan penjaminan mutu pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, sedangkan kegiatannya terdiri dari kegiatan pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi hasil pemetaan mutu pendidikan, dan fasilitasi sumberdaya pendidikan satuan pendidikan di tingkat propinsi yang menjadi tanggungjawabnya, dan kegiatan rutin, yang meliputi berbagai kegiatan administrasi dan sifatnya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Riau .

Keuangan yang dialokasikan pemerintah dari APBN LPMP Riau pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 51.077.824.000,- (lima puluh satu milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan daya serap sebesar Rp. 48.326.857.056,- (empat puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah) sehingga sisa anggaran Rp 2.750.966.944,-(dua milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) .Setiap tahun anggaran, instansi berwenang selalu melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga

pemerintah. LPMP Riau berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk LAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP disusun sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang kinerja instansi pemerintah dan kebermanfaatannya, antara lain:

- a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah (*good governance*) yang didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
- c. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah/LPMP.
- d. LAKIP juga digunakan sebagai bahan masukan bagi Kemdikbud dan Dikdasmen dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Selanjutnya, selama kurun setahun program dan kegiatan, LPMP Riau menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan tersebut mempengaruhi capaian target yang telah ditetapkan.

Kepala

Pekanbaru, Januari 2019

Drs. Mulyatsyah, MM

NIP.196407141993041001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai perubahan paradigma dan pandangan bidang pendidikan terus bergeser seiring dengan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan. Implikasinya dirasakan dalam berbagai aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu juga memacu timbulnya berbagai tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan dan pemberian pelayanan prima oleh aparatur pemerintah yang menangani pendidikan. Untuk mengakomodir tuntutan tersebut, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan, program dan kegiatan strategis untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menyebabkan terjadinya pergeseran peta dan paradigma pendidikan, yaitu yang semula dikelola secara sentralistik oleh pemerintah pusat sekarang dikelola oleh pemerintah daerah. Kondisi ini sangat diharapkan mampu menciptakan pengelolaan pendidikan menjadi lebih kompetitif sehingga menghasilkan lulusan atau tamatan yang berkualitas dan terstandar guna menuju otonomi dan privatisasi dalam bidang pendidikan.

Untuk mendukung pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan pengendalian terhadap mutu (*quality control*) dan penjaminan mutu (*quality assurance*). Dengan tujuan agar pelaksanaan pendidikan sesuai dengan standar, norma, kriteria dan pedoman penyelenggaraan pendidikan nasional dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien dan akuntabel demi terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikbud yang berada di tingkat provinsi. Diharapkan mampu menjadi agen informasi dalam meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan yang lebih profesional dengan mewujudkan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta pemantapan operasionalisasi kebijakan pemerintah pusat khususnya dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Dengan meningkatnya kualitas guru dan tenaga kependidikan, maka semakin mempercepat peningkatan mutu satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di Provinsi. Karena mengingat guru dan tenaga kependidikan yang berada di satuan pendidikan yang berperan sebagai agen perubahan terhadap peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, LPMP Riau sangat perlu membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah provinsi dan kab/kota agar mendapatkan dukungan berupa kebijakan daerah maupun penyelarasan program yang mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi LPMP Riau khususnya dalam hal pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Riau.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPMP Riau menyusun program kerja yang berpedoman kepada :

1. “Nawacita” yang berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan memberikan perhatian untuk :
 - a. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
 - b. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional;
 - c. melakukan revolusi karakter bangsa;
 - d. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

2. Program prioritas 5 (lima) tahun ke depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu memperbaiki :
 - a. akses terhadap pendidikan berkualitas;
 - b. kualitas pembelajaran;
 - c. sistem penjaminan mutu;
 - d. manajemen dan tata kelola pendidikan;
 - e. relevansi dan daya saing pendidikan tinggi;
 - f. pendidikan agama, moral, dan pembentukan karakter.
3. Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu :
 - a. penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan;
 - b. pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan;
 - c. peningkatan akses Paud, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus;
 - d. peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter;
 - e. peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan;
 - f. peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.
4. Turunan arah kebijakan dan strategi Ditjen Dikdasmen Kemdikbud yang sesuai dengan tupoksi LPMP sesuai Permendikbud No. 14 tahun 2015 dan DIPA LPMP Riau Tahun Anggaran 2018 juga menjadi pedoman pembuatan program kerja LPMP Riau kedepan yaitu Isu Strategis Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Peningkatan Tata Kelola Pendidikan. Dalam pencapaian isu strategis tersebut, LPMP Riau menetapkan arah kebijakan yaitu:
 - a. memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan;
 - b. mengembangkan kurikulum;

- c. meningkatkan tata kelola pendidikan dalam rangka desentralisasi;

Program Kerja LPMP Riau ini merupakan penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) LPMP Riau tahun 2018 yang disusun sebagai pedoman dan arah kegiatan LPMP Riau sepanjang Tahun Anggaran 2018.

Sebagai lembaga pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka LPMP Riau memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan tugas dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
12. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Perjanjian Kinerja;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
14. Permenpan nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP;
17. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
19. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Rencana Strategis LPMP Riau Tahun 2015 – 2019;
21. Kontrak Kinerja Kepala LPMP Riau dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2018.

C. Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja LPMP Riau disusun dengan tujuan untuk memberikan penjelasan tentang :

1. keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran strategis LPMP Riau dari bulan Januari s.d Desember 2018;
2. kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
3. sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Riau sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

D. Tugas dan Fungsi

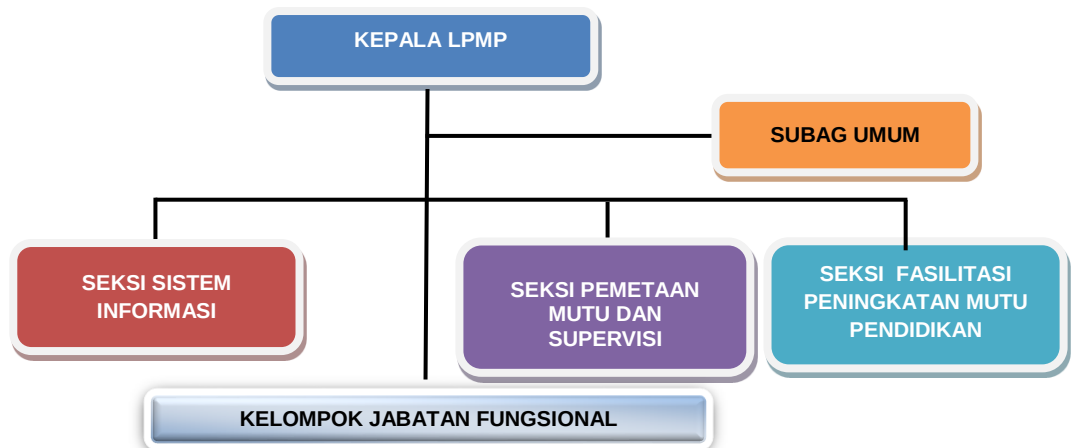
Berdasarkan Permendikbud No. 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP, menyatakan bahwa LPMP bertugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:

1. pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
2. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
3. supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional;
4. fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan

6. pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

E. Struktur Organisasi

**Bagan 1.1. Struktur Organisasi LPMP Riau
(Permendikbud No. 14 Tahun 2015)**



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LPMP Riau dibantu oleh Sub Bagian Umum, Seksi Sistem Informasi, Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi, Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan, serta Tenaga Fungsional yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP Riau. Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan LPMP Riau.
- b) Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- c) Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.

- d) Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan. Sedangkan kelompok jabatan fungsional berada di bawah pembinaan Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan arah pembangunan pendidikan pada 4 (empat) periode yaitu rencana pembangunan jangka menengah Periode 2005-2009 diarahkan pada peningkatan kapasitas dan modernitas sistem pendidikan. Periode 2010 - 2014 diarahkan pada peningkatan dan penguatan pelayanan pendidikan pada tingkat nasional. Periode 2015-2019 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat regional. Periode 2020-2024 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat Internasional.

Untuk periode tahun 2015-2019, Ditjen Dikdasmen mengarahkan kebijakan perencanaan program melalui restrukturisasi program dan kegiatan serta penganggaran berbasis kinerja pada penguatan layanan yang berfokus pada penjaminan peningkatan mutu pendidikan. LPMP Riau menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Dikdasmen 2015-2019 ke dalam Renstra LPMP Riau, kemudian dijabarkan lagi ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Selanjutnya dari dokumen tersebut disusun Kontrak Kinerja antara Kepala LPMP dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai Permen PAN&RB No. 53 Tahun 2014 dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Renstra LPMP Riau disusun berdasarkan reformasi perencanaan dan penganggaran untuk lebih memantapkan penerapan *performance-based budgeting* sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan.

1. Visi, Misi dan Tata Nilai LPMP Riau

a. Visi LPMP Riau

Menjadi LPMP yang Akuntabel dan Profesional untuk Mewujudkan Insan serta Ekosistem Pendidikan Bermutu di Riau.

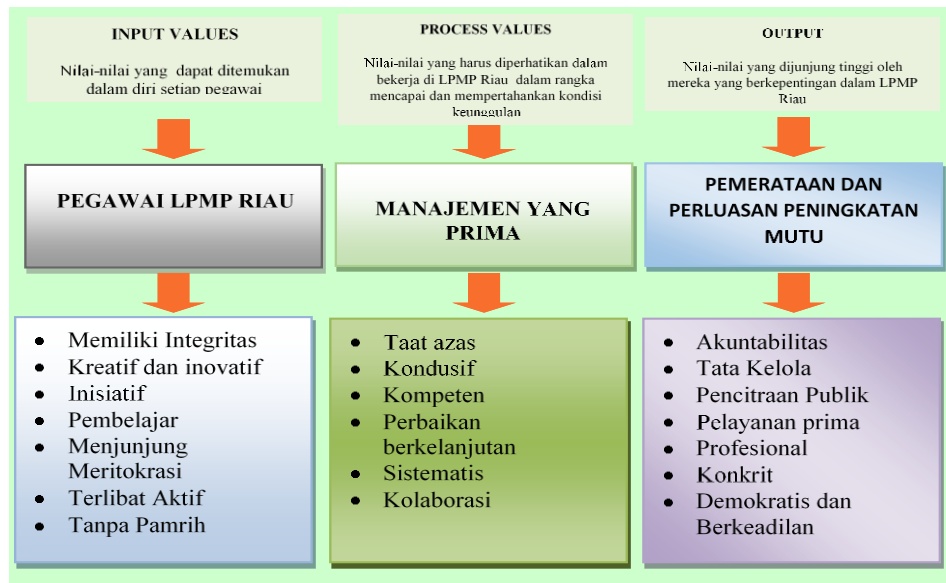
b. Misi LPMP Riau

1. Melaksanakan pemetaan mutu, supervisi dan fasilitasi di setiap jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Riau;
2. Meningkatkan capaian Standar Nasional Pendidikan di setiap jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah menuju pendidikan yang bermutu di Provinsi Riau;
3. Meningkatkan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik di Provinsi Riau.

c. Tata Nilai LPMP Riau

Dalam melaksanakan layanan penjaminan mutu pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, LPMP Riau menyadari pentingnya penetapan tata nilai yang merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi sikap dan perilaku seluruh insan LPMP Riau dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan visi dan misi LPMP Riau. Untuk itu, LPMP Riau menetapkan dan mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (*input values*), nilai-nilai dalam melakukan pekerjaan (*process values*) serta nilai-nilai yang akan ditangkap oleh para *stakeholders* (Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat dan komponen lainnya).

Gambar 2.1 Tata Nilai LPMP Riau



Nilai masukan yang tepat akan mengantisipasi karakteristik pegawai LPMP Riau, yang selanjutnya akan menjalankan nilai proses manajemen organisasi dengan baik untuk meningkatkan mutu interaksi antar manusia dalam struktur organisasi LPMP Riau, sehingga menghasilkan nilai keluaran yang akan memfokuskan LPMP Riau kepada hal-hal yang diharapkan dalam pencapaian visi dan misi dengan baik.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis LPMP Riau Tahun 2015 – 2019

a. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis LPMP Riau tahun 2015 – 2019 mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan strategis tersebut adalah :

- 1) Terpetakannya mutu pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
Mewujudkan peta mutu pendidikan dasar dan menengah untuk tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah dengan memaksimalkan penjarangan dan pengolahan data pendidikan yang akurat sebagai acuan pembuatan peta mutu pendidikan. Kegiatan ini akan memetakan mutu pendidikan disemua satuan pendidikan dasar dan menengah yang ada di

Provinsi Riau dan peningkatan indeks efektifitas satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Riau.

- 2) Tercapainya peningkatan kualitas standar nasional pendidikan di setiap jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Riau.

Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan ini perlu dilakukan untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik yang baik dan inovatif. Peningkatan capaian kualitas Standar Nasional Pendidikan ini akan diwujudkan dengan adanya kegiatan supervisi dan kegiatan fasilitasi terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah dipetakan mutunya berdasarkan SNP.

- 3) Terbentuknya pangkalan data pendidikan untuk setiap jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Riau.

Terbentuknya pangkalan data pendidikan setiap jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Riau yang diharapkan menjadi sistem teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, dan LPMP Riau. Pangkalan data ini akan mempercepat akses informasi pendidikan setiap satuan pendidikan dasar dan menengah dalam rangka kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang menjadi tugas pokok dan fungsi LPMP Riau serta diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan bidang pendidikan dasar dan menengah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau.

- 4) Terwujudnya tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel.

Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan akan membantu penguatan kapasitas tata kelola pada

pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama pendidikan di provinsi; mewujudkan birokrasi LPMP Riau yang bersih, efektif dan efisien. Hal ini harus di dukung oleh tersedianya data pendidikan dasar dan menengah tingkat kabupaten/kota yang akurat, berkelanjutan dan terbarukan, capaian nilai LAKIP LPMP Riau pada tahun 2015 – 2019 serta penerapan Prosedur Operasional Standar (POS) dalam semua kegiatan yang dilakukan LPMP Riau.

b. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis

Untuk mengetahui ketercapaian masing-masing tujuan strategis yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran strategis (kegiatan) yang harus dicapai sampai tahun 2019, sehingga menjadi target yang harus dicapai dalam pembangunan pendidikan dasar dan menengah selama 5 (lima) tahun kedepan. Pada setiap sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja program (IKP). Sasaran program LPMP Riau mengacu pada sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun sasaran strategis (kegiatan) LPMP Riau adalah sebagai berikut :

- 1) Memetakan mutu pendidikan di setiap jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah.
Mewujudkan peta mutu pendidikan dasar dan menengah untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau adalah dengan memaksimalkan penjarangan dan pengolahan data pendidikan yang akurat sebagai acuan pembuatan peta mutu pendidikan. Kegiatan ini akan memetakan semua mutu pendidikan satuan pendidikan dasar dan menengah yang ada di Provinsi Riau dan peningkatan indeks efektifitas satuan pendidikan dasar dan menengah sebesar 97%.
- 2) Mensupervisi dan memfasilitasi pencapaian SNP satuan pendidikan dasar dan menengah

Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan ini perlu dilakukan untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik yang baik dan inovatif. Peningkatan capaian kualitas Standar Nasional Pendidikan ini akan diwujudkan dengan adanya kegiatan supervisi dan kegiatan fasilitasi terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah dipetakan mutunya berdasarkan SNP. Kegiatan supervisi dan fasilitasi akan dilakukan terhadap 80 % dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah dipetakan mutunya di Provinsi Riau.

3) Meningkatkan layanan tata kelola LPMP Riau yang baik

Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan akan membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama pendidikan di provinsi; mewujudkan birokrasi LPMP Riau yang bersih, efektif dan efisien. Hal ini harus di dukung oleh tersedianya data pendidikan dasar dan menengah tingkat Kabupaten/Kota yang akurat, berkelanjutan dan terbarukan, capaian nilai LAKIP LPMP Riau pada tahun 2015 – 2019 sebesar 80% serta penerapan Prosedur Operasional Standar (POS) dalam semua kegiatan yang dilakukan dalam lembaga.

3. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Permeneg PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010, pasal 3 menyatakan Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dengan demikian LPMP Riau wajib menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon III yang ditandatangani oleh Kepala LPMP sebagai kontrak kinerja. Perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja LPMP Riau yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun (2018) sesuai rencana strategis LPMP Riau

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja LPMP Riau

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2018	ANGGARAN
1	2		3	4
1.Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya		5.547 sekolah SD,SMP,SM A,SMK	2.733.558.000
	1	SD yang telah dipetakan mutunya	100%	1.807.739.000
	2	Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	60 %	
		Output:		
		<i>SD yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	3.660	.
	3	SMP yang telah dipetakan mutunya	100%	563.778.000
	4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	70%	
		Output:		
		<i>SMP yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	1.148	
	5	SMA yang telah dipetakan mutunya	100%	217.520.000
	6	Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	80%	
		Output:		
		<i>SMA yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	444	
	7	SMK yang telah dipetakan mutunya	100%	144.521.000
	8	Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	70%	
		Output:		

		SMK yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	295	
		Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	192 sekolah SD, SMP,SMA,S MK	3.082.994.000
		Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013	2.184 sekolah SD,SMP, SMA,SMK	14.930.134.000
	9	SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
		Output:		
		a. SD yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	96 Sekolah	1.220.352.000
		b. SD yang melaksanakan Kurikulum 2013	1.455 Sekolah	9.885.620.000
	10	SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
		Output:		
		a. SMP yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	48 Sekolah	770.749.000
		b. SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013	458 Sekolah	3.078.238.000
	11	SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
		Output:		
		a. SMA yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	34	545.946.500
		b. SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013	159 Sekolah	1.186.546.000
	12	SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
		Output:		
		a. SMK yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	34	545.946.500
		b. SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013	112 Sekolah	779.730.000
2. Terwujudnya Tata kelola LPMP Riau baik	1	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru	92%	533.405.000

	2	Nilai Minimal SAKIP LPMP Riau	78	
--	---	----------------------------------	----	--

Berdasarkan tabel 2.1. di atas, dapat dideskripsikan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya pada tahun 2018 adalah :

- 1) melaksanakan pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Provinsi Riau sebanyak 5.547 satuan pendidikan;
- 2) melaksanakan penghitungan indeks efektivitas capaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) berdasarkan hasil Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) tahun 2018.

b. Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP dan Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai IK satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP dan satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 adalah :

- 1) melaksanakan fasilitasi berdasarkan 8 SNP untuk 192 sekolah model se Provinsi Riau dengan jabaran 96 Sekolah Dasar, 48 Sekolah Menengah Pertama, 24 Sekolah Menengah Atas dan 24 Sekolah Menengah Kejuruan;
- 2) melaksanakan supervisi dan fasilitasi terhadap satuan pendidikan yang melaksanakan K13 sebanyak 2.184 dengan rincian 1.455 Sekolah Dasar, 458 Sekolah Menengah Pertama, 159 Sekolah Menengah Atas dan 112 Sekolah Menengah Kejuruan.

c. Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai IK data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan dan terbaru adalah :

- 1) Pencetakan dan publikasi data dan informasi LPMP, berupa pengembangan SIM Pemetaan mutu pendidikan (SIMMudik), pencetakan dokumen Rapor Mutu satuan pendidikan dan Peta Mutu Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 2) Pelayanan data dan informasi penjaminan mutu pendidikan, berupa pengembangan sistem Unit Layanan Terpadu (ULT) dan pengembangan laman LPMP Riau;
- 3) Magang layanan data dan informasi penjaminan mutu pendidikan, berupa kegiatan magang kerja ULT LPMP Riau ke ULT Kemdikbud;
- 4) Penyusunan dan penerbitan Buletin LPMP Riau tahun 2018 semester 1 dan 2;
- 5) Publikasi pameran ekosistem pendidikan Hardiknas tahun 2018;
- 6) Penelitian Penjaminan Mutu Pendidikan yang dilaksanakan oleh Widyaiswara LPMP Riau.

d. Nilai Minimal SAKIP LPMP Riau

Untuk tahun 2018, LPMP Riau menargetkan pencapaian nilai minimal SAKIP sebesar 78.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018, LPMP Riau berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya dan juga sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja LPMP Riau.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja program dan kegiatan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Riau merupakan salah satu layanan penting dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terhadap penjaminan mutu pada satuan pendidikan di seluruh Provinsi. Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Dikdasmen tahun 2016 ditetapkan melalui capaian IKK LPMP. Capaian kinerja untuk 3 (tiga) tujuan strategis LPMP, yaitu:

1. terpetakannya mutu pendidikan tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau;
2. tercapainya peningkatan kualitas standar nasional pendidikan di setiap jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Riau;
3. terwujudnya tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel.

Ketercapaian ketiga tujuan strategis LPMP tersebut diukur dari beberapa IKK LPMP yang menjadi tujuan strategis LPMP dengan hasil capaian sebagaimana dalam tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1: Pengukuran Kinerja LPMP Riau Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		TARGET			Realisasi			
			Fisik	%	Anggaran	Fisik	%	Anggaran	%
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya		5.547 Sekolah	100	2.205.030.000	5.491 Sekolah	99,0	2.196.799.960	98,99%
	1	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya							
	2	Output : <i>SD yang terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	3.660 Sekolah	100	1.803.646.000	3.639 Sekolah	99,42	176.8616.462	98.1
		Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya							
	3	Output : <i>SMP yang terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	1.148 Sekolah	100	565.734.000	1.131 Sekolah	98,95	549.685.000	97.2
		Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya							
	4	Output : <i>SMA yang terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	444 Sekolah	100	218.802.000	436 Sekolah	98,2	211.903.000	96.8
		Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya							
		Output : <i>SMK yang terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	295 Sekolah	100	145.376.000	285 Sekolah	96,61	138.515.000	95.3
	Persentase Satuan Pendidikan yang telah di fasilitasi berdasarkan 8 SNP		192 Sekolah	60%	3.048.498.000	192 Sekolah	100	3.031.305.952	99,4
	5	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP							
		Output : <i>SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP</i>	76 Sekolah	60 %	1.011.859.250	76 Sekolah	100	1.008.191.501	99,6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET			Realisasi			
		Fisik	%	Anggaran	Fisik	%	Anggaran	%
	SD yang melaksanakan Kurikulum 2013	1.455 Sekolah		8.017.188.000	1.455 sekolah	100	7.981.949.000	99,56
	6 Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP							
	7 Output : SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	48 sekolah	60%	639.069.000	48 Sekolah	100	636.752.000	99,6
	SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013	458		3.754.329.000	458 Sekolah		3750.954.701	99,9
	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP							
	8 Output : SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	34 Sekolah		452.673.875	34 Sekolah	100	452.032.000	99,9
	SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013	159 Sekolah		1.782.681.000	159 Sekolah	100	1.778.066.000	99,74
	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP							
	Output : SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	34 sekolah		1.782.681.000	34 sekolah	100	1.778.066.000	99,74
	SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013	112 Sekolah	100	1.375.936.000	112 Sekolah	100	1.371.115.500	99,65

Sumber: Perjanjian Kinerja LPMP Riau tahun 2018

Secara rinci, capaian kinerja LPMP Riau berdasarkan indikator kinerja sampai Tahun 2018 sebagai berikut :

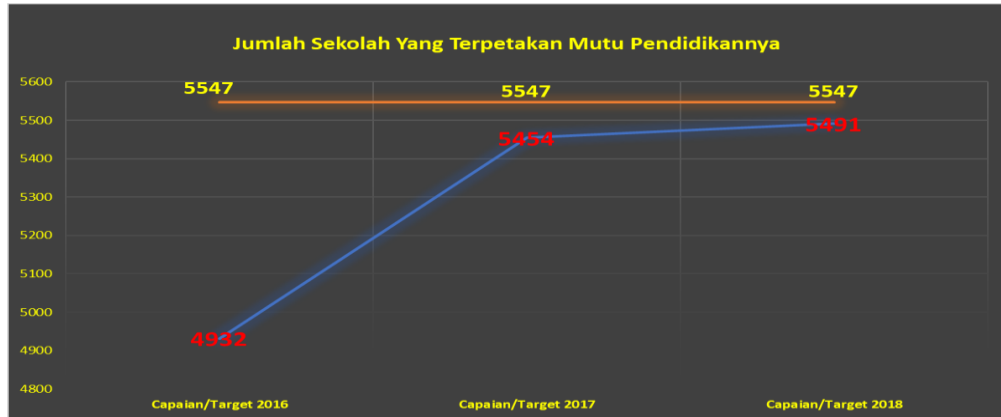
1. Satuan Pendidikan Yang Terpetakan Mutu Pendidikannya (5630.001)

Tabel 3.2 Tabel Pengukuran Kinerja satuan Pendidikan Yang Terpetakan Mutu Pendidikan Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016				Tahun 2017				Target 2018			
		Target (Skl)	%	Realisasi (Skl)	%	Target (Skl)	%	Realisasi (Skl)	%	Target (Skl)	%	Realisasi (Skl)	%
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	satuan pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	-	-	-	-	5.547	100	5.454		5.547	100	5.491	98,99
	1.1. Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	3.639	100	2.423	67	3.655	100	3.655	100	3.660	100	3.639	99,43
	1.2. Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	-	-	-	-	-	-	-	-	2193	60	1115	30,05
	2.1. Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	1.125	100	506		1.143	100	1.121		1148	100	1131	98,55
	2.2. Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	-	-	-	-	-	-	-	-	800	70	306	26,77
	3.1. Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	-	-	-	-	441	100	426	-	444	100	436	98,20
	3.2. Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	-	-	-	-	-	-	-	-	353	80	106	24,03
	4.1. Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	-	-	-	-	293	100	280	-	295	100	285	96,61
	4.2. Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	-	-	-	-	-	-	-	-	205	70	64	22,18

Dari tabel pengukuran kinerja satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikan diatas, terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian dari tahun 2016 s.d. 2018. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan di Propinsi Riau berjalan dengan baik. Untuk data persentase satuan pendidikan yang meningkat indek efektivitasnya di tahun 2018 belum ditampilkan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan proses pengolahan data mutu masih berjalan di tingkat pusat. Untuk lebih jelasnya, jumlah sekolah yang terpetakan mutu pendidikannya dapat dilihat pada pada grafik dibawah ini:

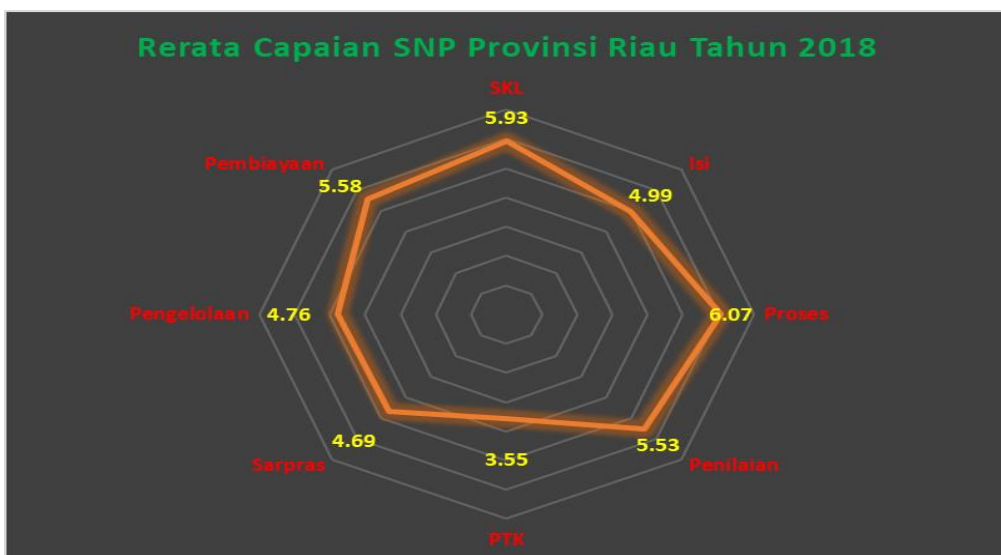
Grafik 3.1
Jumlah Sekolah yang Terpetakan Mutu Pendidikannya



Sumber Data : PMP Dikdasmen Kemdikbud.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan adalah tergambaranya kondisi pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan satuan pendidikan terhadap capaian 8 (delapan) SNP (Standar Nasional Pendidikan). Berikut capaian 8 SNP Provinsi Riau berdasarkan hasil Pemetaan Mutu Pendidikan Tahun 2018 :

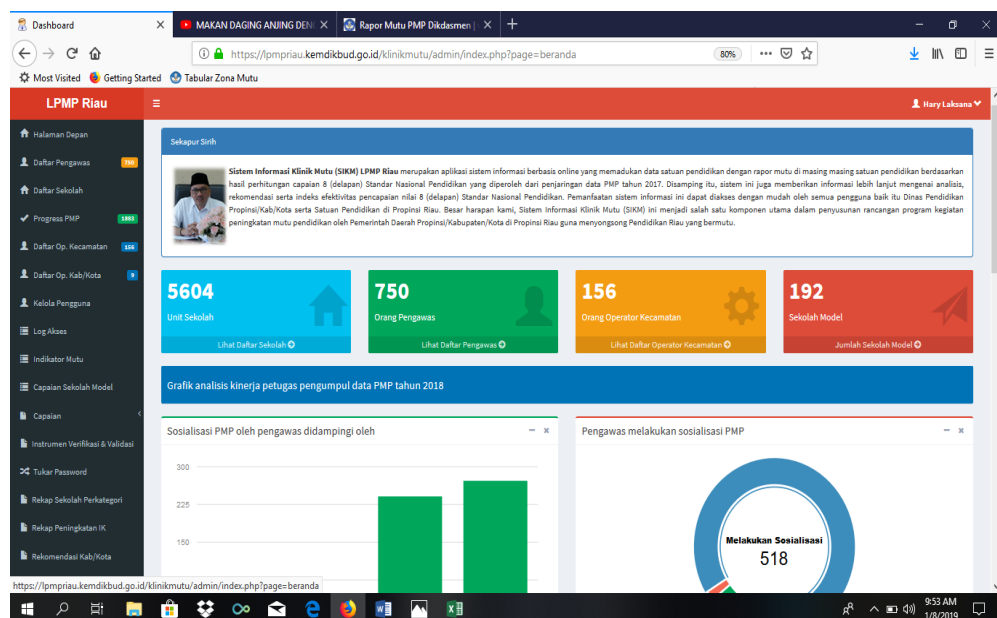
Grafik 3.2
Rerata Capaian SNP Provinsi Riau Tahun 2018



Sumber Data : <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id>

Seiring dengan pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP), LPMP Riau terus melakukan inovasi dan pengembangan dalam upaya peningkatan akses informasi peta mutu pendidikan. Tahun 2018, LPMP Riau melakukan perubahan terhadap layanan informasi peta mutu dengan melakukan pengembangan sistem melalui Sistem Informasi dan Komunikasi Mutu Pendidikan (SIMMudik) yang sebelumnya dikenal dengan SIKM (Sistem Informasi Klinik Mutu). Berikut *capture* tampilan beranda SIMMudik :

Gambar 3.1
Laman SIMMudik LPMP Riau



Tahun 2018 LPMP Riau melakukan sinkronisasi dan penyandingan antara Peta Mutu Pendidikan dengan Sistem Zonasi yang telah dirilis oleh Kemdikbud. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai rapor mutu satuan pendidikan yang berada dalam satu zonasi. Berikut tampilan informasi rapor mutu satuan pendidikan dalam zonasi :

Gambar 3.2
Penyandingan Zonasi dan Peta Mutu

No	NPSN	Nama Sekolah	PMP	SKL	ISI	Proses	PTK	Sarpras	Penge- lolaan	Pembi-ayaan	Penit- lisan
1	10494598	SDIT AL FITYAH	5.89	6.52	6.38	6.80	6.69	4.33	4.42	5.87	6.10
2	10494594	SD BARUSSALAM	5.87	6.91	6.34	6.90	6.10	4.52	4.34	5.66	6.19
3	10494816	SD NEGERI 010 SAWAH	5.85	6.08	5.72	6.46	5.93	4.85	5.40	4.36	7.99
4	10400603	SD NEGERI 029 SUNGAPINANG	5.82	6.10	6.32	6.76	6.63	4.93	3.66	5.92	6.22
5	10404103	SD NEGERI 113 PEKANBARU	5.81	6.08	6.16	6.69	6.45	4.94	4.28	5.73	6.10

Disamping itu, berbagai informasi tambahan lainnya juga ditampilkan melalui SIMMudik dengan harapan SIMMudik mampu menjawab kebutuhan *stakeholder* dalam hal peningkatan mutu pendidikan berbasis data. Berikut tampilan menu informasi SIMMudik 2018 :

Gambar 3.3
Fitur SIMMudik 2018

Nama Sekolah	Alamat	Key
SD Islam Terpadu Insan Utama 2 NPSN : 69858815	Jl. Karya/Ikhlas No. 223 Tuah Karya Kota Pekanbaru	AD1 085
SD IT BINTANG CENDEKIA NPSN : 10495040	Jl. Lobak DELIMA Kota Pekanbaru	NU 076
SD IT IMAM SYAFII CENDIKIA NPSN : 69945263	Jl. SOEKARNO HATTA I Maharatu Kota Pekanbaru	HE1 085
SD NEGERI 165 PEKANBARU NPSN : 10404475	Jl. Serasi Gg.semangka DELIMA Kota Pekanbaru	JAS 076
SD NEGERI 187 PEKANBARU NPSN : 69755597	Jl. Melati SIMPANG BARU Kota Pekanbaru	LEC 082

Inovasi dan pengembangan PMP yang telah dilakukan oleh LPMP Riau mendapat dukungan dan apresiasi dari LPMP lain. Hal ini terlihat dari banyaknya LPMP lain yang mengadopsi konsep dan sistem SIMMudik LPMP Riau. Disamping itu, diberbagai kegiatan, LPMP Riau diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan SIMMudik, diantaranya :

- a. Rakor Kepala LPMP se Indonesia di LPMP Jawa Timur pada bulan April 2018;
- b. Bimbingan Teknis Pemanfaatan SIMMudik untuk LPMP wilayah Sumatera dan Kalimantan di LPMP Jambi pada bulan Mei 2018;
- c. Rapat Pimpinan Nasional Kemdikbud di Jogjakarta pada bulan Nopember 2018;
- d. Workshop Sinkronisasi Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu di LPMP Jawa Tengah pada bulan Nopember 2018;
- e. Banchmarking LPMP Jawa Tengah, LPMP Maluku Utara, LPMP Sumatera Selatan dan LPMP Sulawesi Selatan di LPMP Riau pada bulan Bulan Desember 2018;

Persentase Progres pengiriman data PMP LPMP Provinsi Riau tahun 2018 sebesar 99,26% atau 5.491 sekolah dari 5.547 sekolah yang ada di Provinsi Riau. Terdapat 41 sekolah (0.74%) yang tidak melakukan pengiriman data PMP secara online. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Ada beberapa sekolah yang mengalami kendala secara teknis terkait dengan perubahan versi Dapodik terbaru dengan sistem PMP, sehingga sistem PMP yang dimiliki sekolah tidak terhubung dengan Sistem Dapodik terbaru. Hal ini mengakibatkan sekolah tidak dapat mengakses aplikasi PMP;
- b. Terdapat sekolah yang terdaftar secara sistem melalui Verval Satuan Pendidikan (Verval SP), namun sekolah tersebut belum beroperasi/berjalan. Dan terdapat juga sekolah yang tidak

beroperasi/berjalan lagi. Sehingga secara sistem sekolah tersebut terdata sebagai sekolah yang melaksanakan PMP;

- c. Pelaksanaan PMP di tingkat satuan pendidikan menjadi beban tambahan bagi Operator Sekolah khususnya dalam hal pengisian instrument oleh semua responden. Sehingga ini memperlambat proses pengisian dan pengiriman data PMP secara online.

1.1. Sekolah Yang Terverifikasi Data Mutunya (5630.001.001)

Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan output diatas adalah:

a) Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan (051)

Dilaksanakannya komitmen Bersama antara LPMP Riau dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam rangka percepatan pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) di Tingkat Provinsi yang dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi dengan target fisik sebanyak 61 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 175.755.000,-

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 98,61% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 174.936.300 (99,53%).

Capaian realisasi fisik dan keuangan tersebut diatas tidak mencapai 100% disebabkan oleh ketidakhadiran peserta/undangan sebanyak 1 orang dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, LPMP Riau memberikan dokumen hasil pemetaan mutu pendidikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui utusan yang hadir.

b) Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Pengumpulan Data (052)

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Pengumpulan Data ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan

pelaksanaan PMP di Propinsi Riau tahun 2018 yang diawali dengan pemberian bimbingan teknis kepada pada operator/admin Dapodik tingkat provinsi/kab/kota, pejabat penanggungjawab pendataan serta perwakilan operator Dapodik tingkat sekolah yang akan menjadi Fasilitator Daerah di wilayah kerja masing - masing dengan target fisik kegiatan sebanyak 38 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.440.000,-.

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 38 orang atau 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp 40.339.750,- atau 99,75%.

Kegiatan berjalan sesuai dengan juknis yang ada serta tidak mengalami kendala baik teknis maupun administrasi. Namun, untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Fasda dapat berjalan dengan baik, LPMP Riau melakukan monitoring dan evaluasi melalui SIMMudik.

c) Bimbingan Teknis Pengawas (055)

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas dihadiri oleh 769 orang pengawas dari 843 orang yang diundang dan bertugas sebagai koordinator pengumpulan data PMP dengan alokasi anggaran sebesar Rp 927.138.000,- dan realisasi sebesar Rp 926.319.750,- (99,91 %).

Kurangnya capaian realisasi fisik tersebut diatas disebabkan oleh ketidakhadiran peserta/undangan sebanyak 74 orang yang disebabkan oleh :

1. Kegiatan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan penguatan pengawas sekolah oleh dinas pendidikan;
2. Beberapa calon peserta menunaikan ibadah haji;
3. Beberapa calon peserta sedang melaksanakan visitasi akreditasi sekolah/ madrasah.

Untuk mengatasi masalah diatas, yang dilakukan adalah :

1. Memberdayakan Fasda Pengumpulan data prov/kab/kota untuk melakukan sosialisasi kepada pengawas yang tidak hadir mengikuti bimtek;
2. Diseminasi materi bimtek oleh pengawas sekolah yang hadir.

d) Pelaksanaan Pengumpulan Data (056)

Kegiatan Pengumpulan Data PMP terhadap 5.547 satuan pendidikan yang terdiri atas 3.660 SD, 1.148 SMP, 446 SMA, 295 SMK di 12 Kab/Kota se Propinsi Riau dilaksanakan pada bulan Juli s.d September 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 632.430.000,- dan realisasi sebesar Rp. 626.217.000,- (99,02%).

Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data PMP adalah :

1. Terdapat sekolah yang mengalami kendala secara teknis terkait dengan perubahan versi Dapodik terbaru dengan sistem PMP, sehingga sistem PMP yang dimiliki sekolah tidak terhubung dengan Sistem Dapodik terbaru. Hal ini mengakibatkan sekolah tidak dapat mengakses sistem PMP;
2. Terdapat sekolah yang terdaftar secara sistem melalui Verval Satuan Pendidikan (Verval SP), namun sekolah tersebut belum beroperasi/berjalan. Disamping itu, terdapat juga sekolah yang tidak beroperasi/berjalan lagi. Sehingga secara sistem sekolah tersebut terdata sebagai sekolah yang melaksanakan PMP;
3. Pelaksanaan PMP disatuan pendidikan menjadi beban tambahan bagi operator sekolah khususnya dalam hal pengisian instrumen oleh semua responden.

Menyikapi hal tersebut diatas, LPMP Riau melakukan beberapa langkah, yaitu :

1. Pembentukan Satgas Akselerasi PMP LPMP Riau sebanyak 38 orang;
2. Pembentukan Satgas Pengumpulan Data PMP propinsi dan kabupaten/kota sebanyak 25 orang;
3. Pembentukan Operator Pengumpulan Data tingkat kecamatan sebanyak 173 orang;
4. Pemberian bantuan transportasi kunjungan ke sekolah binaan pengawas terhadap 819 orang.

e) Verifikasi dan Validasi (057)

Kegiatan verifikasi dan validasi data PMP dilakukan oleh 819 orang pengawas sekolah terhadap 5.547 satuan pendidikan yang merupakan satuan pendidikan binaan pengawas tersebut pada bulan agustus s.d september tahun 2018. Sedangkan LPMP Riau melakukan verifikasi dan validasi kepada pengawas pelaksana PMP dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh LPMP Riau guna mendapatkan gambaran pelaksanaan verifikasi dan validasi oleh pengawas terhadap satuan pendidikan binaannya. Alokasi anggaran sebesar Rp 346.907.000,-. Dengan realisasi Rp. 346.704.000,- (99,94%).

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah :

1. LPMP Riau belum mampu melakukan verifikasi dan validasi langsung ke satuan pendidikan terkait kebenaran data yang diisi oleh responden melalui instrumen PMP. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan dana dan SDM yang dimiliki;
2. Keterwakilan pelaksanaan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pengawas terhadap satuan pendidikan binaannya belum optimal dilakukan, mengingat kondisi geografis dan jarak tempat tugas pengawas dengan satuan pendidikan binaannya. Sehingga

biaya bantuan transportasi yang diberikan oleh LPMP belum mencukupi.

Menyikapi kondisi diatas, LPMP Riau melakukan beberapa langkah, yaitu dengan :

1. Memanfaatkan SIMMudik dalam mendapatkan informasi pelaksanaan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengawas dengan meminta informasi kepada satuan pendidikan melalui operator sekolah;
2. Melakukan pengajuan penambahan anggaran bantuan transportasi kunjungan pengawas ke satuan pendidikan binaannya.

1.2. Sekolah Terpetakan Mutu Pendidikan (5630.001.002)

a) Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu (051)

Kegiatan Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu dilaksanakan dari bulan nopember s.d desember 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 203.799.000,- dengan realisasi Rp 193.891.600 (95,14%)

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Rapat dalam kantor;
- Workshop sinkronisasi penyusunan peta mutu dan pengolahan data mutu;
- Workshop penyusunan peta mutu dan pengolahan data mutu.

Output penyusunan Peta Mutu tahun 2018 telah dikembangkan dengan melakukan sinkronisasi hasil PMP dengan Sistem Zonasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai Rapor Mutu Satuan Pendidikan yang ada dimasing – masing zonasi. Namun, penyusunan peta mutu dan pengolahan data mutu pendidikan tahun 2018 belum 100%

terselesaikan. Hal ini disebabkan proses pengolahan data masih berjalan ditingkat pusat. Untuk mengantisipasi kondisi ini, LPMP Riau terus melakukan koordinasi dengan Satgas PMP Dikdasmen Kemdikbud.

b) Analisis Data Mutu (052)

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan analisis data peta mutu pendidikan Provinsi Riau yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyusunan rekomendasi kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota terkait capaian mutu satuan pendidikan di wilayah masing-masing dengan target fisik sebanyak 32 dinas pendidikan Provinsi, Kota Pekanbaru dan LPMP Riau orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.473.000,-

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 61.809.000,- (78.76%).

Kendala yang dihadapi adalah ketidakhadiran beberapa peserta dari dinas pendidikan Provinsi dan kota Pekanbaru.

Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah digantikan peserta dari LPMP Riau, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah penyerapan anggaran. Sebab, komponen biaya untuk peserta LPMP Riau lebih rendah dibanding peserta dinas Provinsi dan Kota Pekanbaru

c) Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu (053)

Dinas Pendidikan Kab/Kota di Provinsi Riau diharapkan mampu memanfaatkan peta mutu dengan menganalisis kelemahan-kelemahan yang ada sehingga bisa menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan mutu pendidikan dengan target fisik sebanyak 72 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 191.652.000,-

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 161.746.500,- (84.4%).

Kendala yang dihadapi adalah :

1. ketidakhadiran 1 peserta dari dinas pendidikan Kab. Siak dikarenakan yang bersangkutan mengikuti kegiatan lain yang bersamaan waktunya di kab. Siak.
2. Penggunaan bahasa rekomendasi bervariasi di karenakan peserta yang bervariasi dari 12 Kab/Kota

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilaksanakan yaitu:

1. di carikan pengganti yaitu pengawas dari kota Pekanbaru sehingga hal ini mempengaruhi jumlah penyerapan anggaran. Sebab, komponen biaya untuk peserta dari Pekanbaru lebih rendah dibanding peserta dari luar Pekanbaru
2. Penataan bahasa rekomendasi oleh tim Akselerasi Percepatan Mutu Pendidikan LPMP Riau

d) Diseminasi Pemetaan Mutu

Dalam kegiatan diseminasi ini, LPMP Riau menyampaikan hasil rekomendasi yang telah disusun kepada Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota melalui roadshow. Melalui kegiatan ini juga disampaikan pentingnya pemerintah Kabupaten/Kota terutama dinas pendidikan untuk senantiasa meningkatkan komitmen terkait upaya peningkatan mutu pendidikan di wilayah masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seksi SI LPMP Riau dengan alokasi sebesar Rp. 54.604.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.472.402,- (99.76%)

2. Satuan Pendidikan Yang Telah Difasilitasi Berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) (5630.003)

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja satuan Pendidikan Yang Telah Difasilitasi berdasarkan 8 SNP tahun 2018

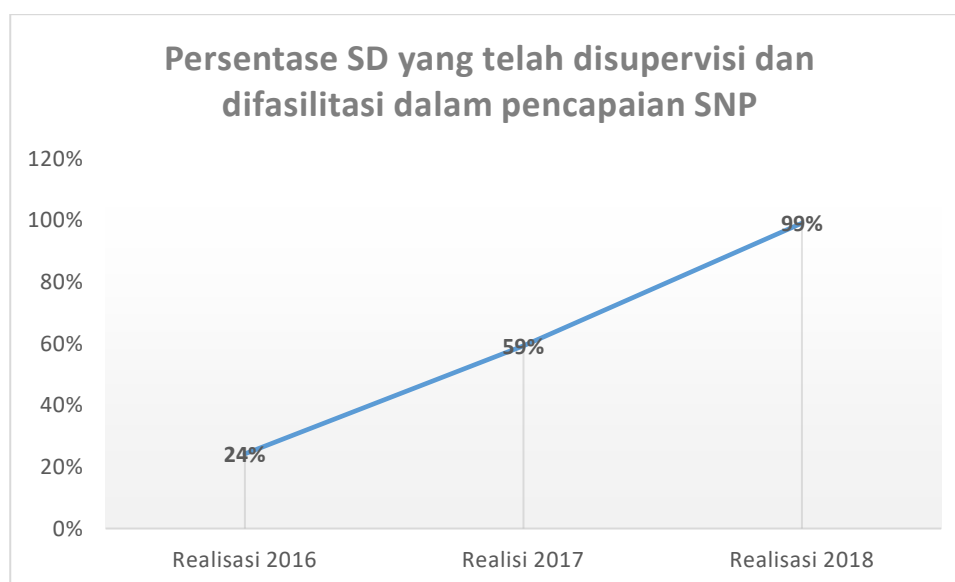
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019			
		Target	%	Realisasi	Realisasi	%	%	Realisi	%	Target	%	Realisasi	%	Target	%	Realisasi	%
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	96 Sekolah	100	96 Sekolah	100	192 Sekolah	100	191 Sekolah	99,7	192 Sekolah	100	192 Sekolah	100	192 Sekolah	100		
	Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum 2013	1369 Sekolah	25%	1325 Sekolah	24%	1922 Sekolah	40%	1948 Sekolah	59%	2184 Sekolah	60%	2184 Sekolah	98%	-	-		
	1. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP																
	SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	48	100	48	100	76	100	75	98,7	76	100	76	100	76	100		
	SD yang nmelaksanakan Kurikulum 2013	907	100	887	97,8	1.280	100	1.280	100	1455	100	1455	100	-	-		
	2. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP																
	SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	24	100	24	100	48	100	48	100	48	100	48	100	48	100		
	SMP yang nmelaksanakan Kurikulum 2013	282	100	266	94,3	396	100	396	100	458	100	458	100	-	-		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019			
		Target	%	Realisasi	Realisasi	%	%	Realisi	%	Target	%	Realisasi	%	Target	%	Realisasi	%
	3. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP																
	<i>SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP</i>	12	100	12	100	34	100	34	100	34	100	34	100	34	100		
	<i>SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	108	100	122	113	148	100	148	100	159	100	159	100	-	-		
	4. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP																
	<i>SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP</i>	12	100	12	100	34	100	34	100	34	100	34	100	34	-		
	<i>SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	72	100	50	69.4	98	100	124	126.5	112	100	112	100	-	-		

Tabel 3.4
Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	25%	24%	97%	40%	59%	148%	60%	99%	165%	80%	124%
<i>SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP</i>	48	48	100%	76	75	99%	76	76	100%		
<i>SD yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	907	887	98%	1280	1280	100%	1455	1455	100%		

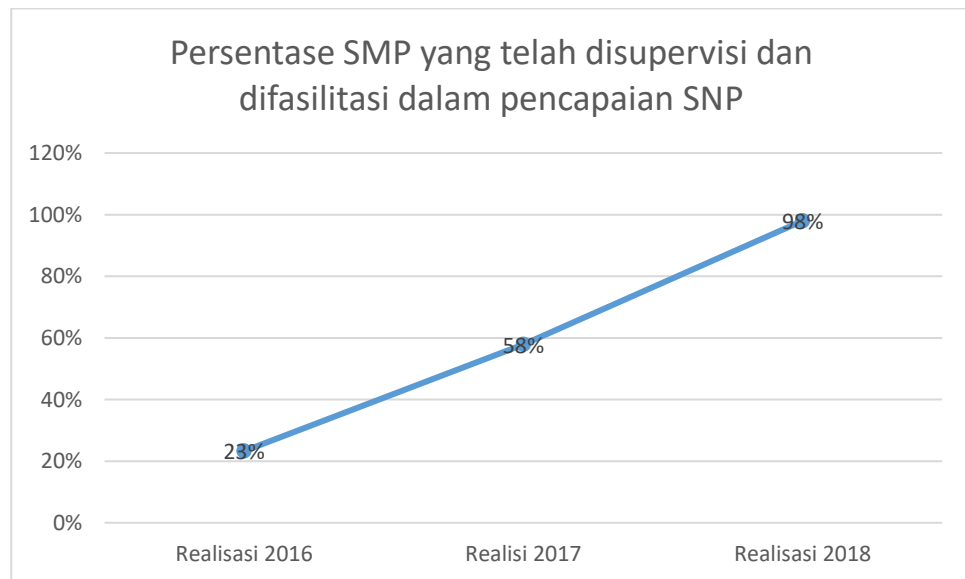
Grafik 3.3
Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP



Sesuai table 3.4 dan grafik 3.3 Persentase capaian SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP dari tahun 2016 s.d tahun 2018 sebesar 124% dari target Renstra tahun 2019 sebesar 80%. Hal ini menunjukkan capaian telah melampaui target yang telah ditetapkan, sesuai dengan program percepatan implementasi K13.

Tabel 3.5**Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP**

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	25%	23%	93%	40%	58%	144%	60%	98%	163%	80%	122%
<i>SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP</i>	24	24	100%	48	48	100%	48	48	100%		
<i>SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	282	266	94%	396	396	100%	458	458	100%		

Grafik 3.4**Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP**

Sesuai tabel 3.5 dan grafik 3.4 Persentase capaian SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP dari tahun 2016 s.d tahun 2018 sebesar 122% dari target Renstra tahun 2019 sebesar 80%. Hal ini menunjukkan capaian telah melampaui target yang telah ditetapkan, sesuai dengan program percepatan implementasi K13.

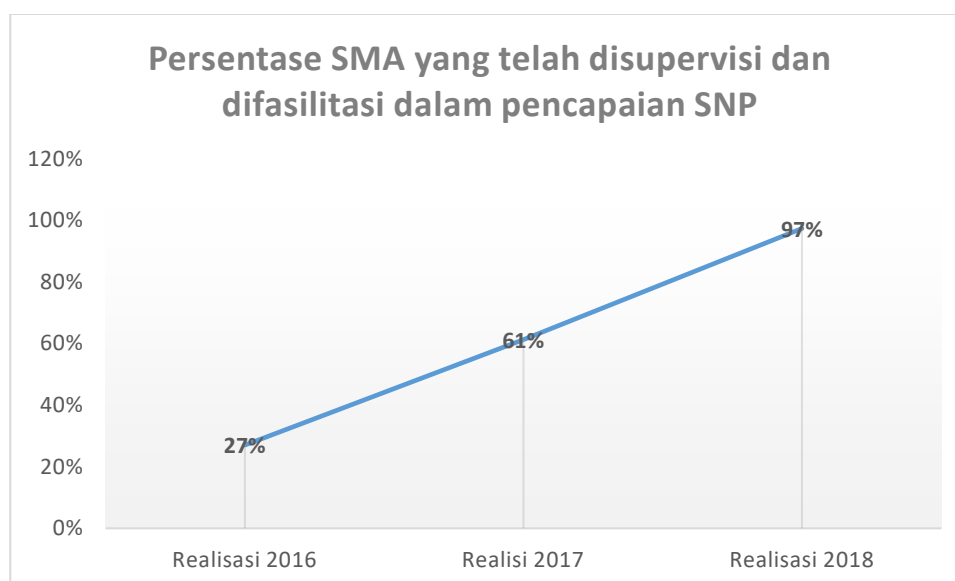
Tabel 3.6

Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	25%	27%	110%	40%	61%	152%	60%	97%	161%	80%	121%
SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	12	12	100%	34	34	100%	34	34	100%		
SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013	108	122	113%	148	148	100%	159	159	100%		

Grafik 3.5

Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

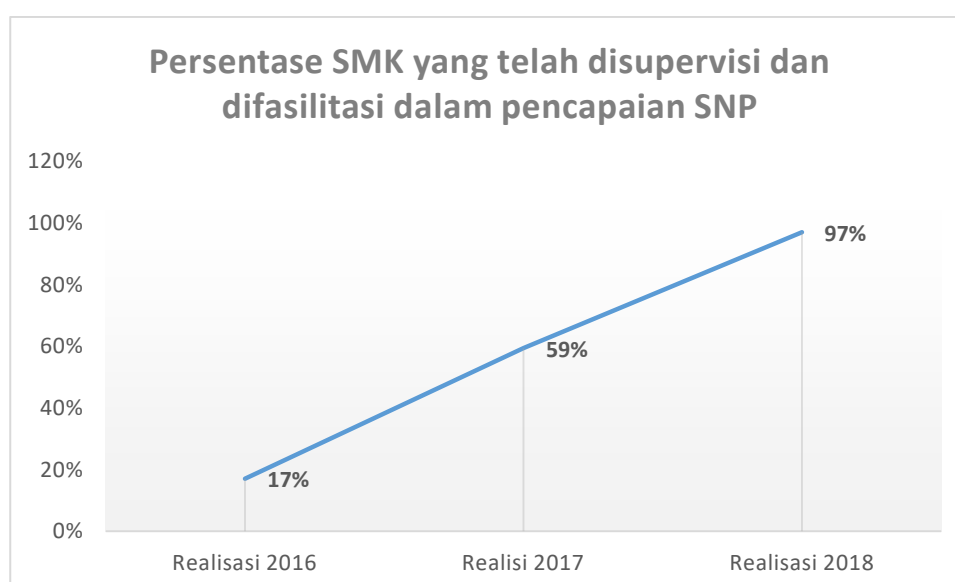


Sesuai tabel 3.6 dan grafik 3.5 Persentase capaian SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP dari tahun 2016 s.d tahun 2018 sebesar 121% dari target Renstra tahun 2019 sebesar 80%. Hal ini menunjukkan capaian telah melampaui target yang telah ditetapkan, sesuai dengan program percepatan implementasi K13.

Tabel 3.7
Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	25%	17%	68%	40%	59%	147%	60%	97%	162%	80%	121%
SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	12	12	100%	34	34	100%	34	34	100%		
SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013	72	50	69%	98	124	127%	112	112	100%		

Grafik 3.6
Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP



Sesuai tabel 3.7 dan grafik 3.6 Persentase capaian SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP dari tahun 2016 s.d tahun 2018 sebesar 121% dari target Renstra tahun 2019 sebesar 80%. Hal ini menunjukkan capaian telah melampaui target yang telah ditetapkan, sesuai dengan program percepatan implementasi K13.

Beberapa persoalan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan output ini antara lain:

1. perubahan data peserta dari Dinas Pendidikan;
2. mutasi kepala sekolah secara mendadak;
3. kondisi geografis sekolah yang tersebar cukup jauh;
4. Ketersediaan SDM dalam melaksanakan pendampingan ke sekolah;

Rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai output kegiatan Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP seperti dibawah ini:

1) Sekolah Model Yang Difasilitasi (5630.003.001)Bimbingan Teknis SPMI (053)

a. Evaluasi sekolah model SPMI

pemerintah daerah dan LPMP melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI di sekolah model beserta sekolah imbasnya. Proses dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion dengan seluruh komponen: sekolah model, dinas pendidikan dan Fasda untuk mengetahui seberapa jauh implementasi SPMI di sekolah model dan kesungguhan pemerintah daerah dalam meningkatkan SNP di sekolah model dan sekolah imbas. Kegiatan ini dilaksanakan di LPMP Riau. Melalui evaluasi ini diharapkan komitmen sekolah makin meningkat dalam menerapkan siklus SPMI, dan menguatnya dukungan pemerintah daerah dengan target fisik sebanyak 435 orang yang dibagi dalam 3 angkatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 489.596.000

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 98.39% dan realisasi keuangan sebesar 99.72%. Capaian

realisasi fisik dan keuangan tersebut diatas disebabkan oleh ketidakhadiran 7 peserta.

Kendala yang dihadapi adalah beberapa peserta yang hadir tidak dikarenakan adanya kegiatan yang bersamaan yaitu Rakor SMA dan SMK oleh Dinas Pendidikan Provinsi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilaksanakan yaitu berkoordinasi dengan dinas kab/kota dan sekolah yang terkait untuk mengganti/mewakili peserta yang tidak bisa hadir.

b. Asistensi penyusunan laporan BANPER operasional SPMI Sekolah model

Agar pelaporan bantuan pemerintah untuk sekolah model yang digunakan untuk pendampingan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan maka LPMP Riau memberikan asistensi dengan mengirimkan 2 orang petugas ke 12 kab/kota untuk memberikan asistensi laporan kegiatan dan laporan keuangan dengan target fisik sebanyak 24 orang petugas dari lpmp, 24 orang panitia lokal dan 384 orang dari sekolah model dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.860.000

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93.58%.

Kendala yang dihadapi adalah

1. Sekolah yang belum menyusun sesuai format yang telah diberikan saat waktu asistensi
2. Kepala Sekolah berganti dan terjadi penggantian TPMPS sehingga menyulitkan penyusunan laporan
3. Sekolah menyusun laporan menggunakan format tahun 2017

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilaksanakan yaitu

1. Mengarahkan sekolah untuk menggunakan format yang disepakati

2. Berkoordinasi dengan sekolah dan mengarahkan untuk membuat laporan sesuai format yang disepakati

2) Pendampingan Sekolah Model (053)

pola yang digunakan adalah pola “whole school approach” dimana seluruh pelaku pendidikan terlibat aktif dalam siklus penjaminan mutu internal di sekolah. Proses pendampingan dilakukan selama 3 kali, yang akan dibantu dilaksanakan oleh Fasda dan Tim LPMP Riau. Waktu pendampingan berlangsung bulan April-Juni 2018. Untuk menunjang kelancaran kegiatan pendampingan, masing-masing sekolah model diberikan bantuan operasional sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan target fisik sebanyak 192 sekolah model di 12 Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.920.000.000.

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%.

Kendala yang dihadapi adalah adanya sekolah yang tidak mengumpulkan lembar kerja model kelas sukses dikarenakan beban kerja sekolah cukup tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilaksanakan yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru agar meluangkan waktu untuk menyelesaikan lembar kerja model kelas sukses.

3) Monitoring dan Evaluasi (055)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) diharapkan dapat menjangkau seluruh komponen sekolah. Hasil monev ini digunakan untuk melihat kemajuan sekolah model dalam meningkatkan mutu pendidikan, agar data perkembangan pencapaian mutu sekolah dapat terdokumentasi ke dalam sistem. Untuk memperoleh hasil monev yang valid dan optimal disiapkan instrumen secara online yang diisi oleh TPMPS di sekolah model, selanjutnya instrumen yang diisi di verifikasi dan di validasi oleh Tim LPMP dengan

target fisik sebanyak 96 sekolah model di 12 Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.820.000,-

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95.85%. Capaian keuangan tersebut diatas disebabkan oleh sebagian besar petugas monev tidak menggunakan seluruh biaya penginapan yang sudah dianggarkan.

Kendala yang dihadapi adalah dengan jarak beberapa sekolah model mempunyai jarak tempuh yang jauh maka tidak semua sekolah model yang mampu di lakukan kegiatan monev karena tidak memungkinkan dengan waktu yang ada.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan monev di tunjuk kepada sekolah model yang terdekat dari ibukota kab/kota dan mampu di tempuh dengan waktu pelaksanaan yang tersedia.

a. Sekolah Yang Difasilitasi Melalui Kemitraan (5630.003.002)

1) Bimbingan Teknis SPME (052)

Kegiatan ini bertujuan memberi bimbingan tekni tentang proses penjaminan mutu yang dilakukan pihak eksternal sehingga terjadi pemercepatan peningkatan mutu pendidikan di setiap kab/kota dimaksud, target fisik sebanyak 53 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.628.000.

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 84.90% dan realisasi keuangan sebesar 99.68%.

Kendala yang dihadapi adalah ada 8 peserta yang tidak hadir di karenakan sakit dan ada yang mengikuti kegiatan lain diwaktu yang bersamaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilaksanakan yaitu menghubungi dinas Pendidikan dari kab/kota yang tidak bisa hadir untuk dicarikan pengganti.

2) Monitoring dan Evaluasi (053)

Bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dinas Pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan percepatan peningkatan mutu pendidikan di daerah mereka sesuai dengan maksud, tujuan dan hasil yang akan dicapai. Monitoring dan evaluasi dilakukan bersamaan dengan pendampingan, menggunakan instrumen yang telah disediakan, dilakukan oleh fasilitator dengan melibatkan komponen sekolah. Hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menggambarkan rencana dan upaya yang telah dilakukan dinas pendidikan dalam mendorong percepatan peningkatan mutu pendidikan di daerah, terutama dalam mengembangkan sekolah model mandiri. Sehingga bisa menjadi masukan bagi LPMP dalam membangun koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan dimaksud. Target fisik sebanyak 91 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.180.000.

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95.81%. Capaian realisasi fisik dan keuangan tersebut diatas disebabkan oleh sebagian besar petugas monev tidak menggunakan seluruh biaya penginapan yang sudah dianggarkan.

Kendala yang dihadapi adalah adanya beberapa pejabat dinas yang menjadi sasaran pengisian instrumen menolak untuk mengisi instrumen karena baru menjabat sehingga tidak mengerti substansi dari pengisian instrumen.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilaksanakan yaitu berkomunikasi dengan kepala dinas pendidikan kab/kota terkait untuk menunjuk pejabat yang mengerti tentang pelaksanaan SPME agar mengisi Instrumen

3) Diseminasi Hasil (054)

a. Diseminasi implementasi penguatan SPMI di sekolah model

Desiminasi implementasi penguatan SPMI di sekolah model dilakukan dalam bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Widyiswara LPMP Riau. Penguatan SPMI dalam kegiatan desiminasi ini lebih difokuskan pada upaya pemenuhan mutu yang dilakukan oleh sekolah model. Melalui kegiatan ini sekolah diingatkan kembali terkait tentang KI dan KD kepada 192 sekolah model di 12 Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.180.000.

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95.81% dikarenakan sebagian besar WI tidak menggunakan seluruh biaya penginapan yang sudah dianggarkan.

Kendala yang dihadapi adalah sasaran yang diharapkan untuk hadir adalah Kepala Daerah dan BAPPEDA namun yang hadir adalah perwakilan saja

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilaksanakan yaitu penyampaian konten diseminasi di optimalkan dan di sederhanakan agar perwakilan mampu menyampaikan hasil kegiatan dengan baik dan lengkap.

b. *Benchmarking* SPMI ke sekolah model

Merupakan salah satu upaya LPMP Riau memberikan penghargaan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Kab. Kepulauan Meranti beserta SDN 3 Selatpanjang Timur dan SMPN 23 Kota Pekanbaru sebagai sekolah model yang berkomitmen baik dalam melaksanakan SPMI agar terpacu lebih baik lagi kedepan supaya terwujud sekolah yang berbudaya mutu target fisik sebanyak 17 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 133.267.000.

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96.51%.

Kendala yang dihadapi adalah sekolah model Jawa Barat yang direncanakan awal adalah SMPN 36 Bandung yang sudah mempunyai prestasi secara nasional maupun internasional namun dikarenakan ada kunjungan kegiatan lain ke sekolah tersebut pada hari yang sama dan sudah terjadwal dari jauh hari maka kunjungan tim benchmarking Riau dibatalkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilaksanakan yaitu mengalihkan kunjungan ke sekolah model yang lain di Jawa Barat yaitu SMPN 5 Leuwi Panjang Bandung.

3. Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Kurikulum 2013 (5630.006)

a. SD Yang Melaksanakan Kurikulum 2013 (5630.006.001)

1) Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 (051)

a. Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Propinsi (IP) Kurikulum 2013 Jenjang SD

Memberikan penyegaran kepada Instruktur Propinsi (IP) jenjang Sekolah Dasar sehingga menghasilkan IP yang kompeten dan siap untuk menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kabupaten/Kota Jenjang SD serta sebagai tim pendamping pelaksanaan pendampingan di sekolah penyelenggaraan K13 dengan target fisik 16 orang. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 96,66% atau Rp 21.047.017 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 21.774.000,-

Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan waktu pelaksanaan penyegaran yang hanya 20 jam pelajaran sementara antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan sangat tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para peserta dan narasumber membuat forum diskusi di luar pelaksanaan kegiatan untuk membahas hal-hal lain terkait perkembangan Kurikulum 2013.

b. Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kabupaten (IK) Kurikulum 2013 Jenjang SD

Tujuan Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kabupaten (IK) Kurikulum 2013 Jenjang SD adalah untuk menghasilkan Instruktur Kurikulum 2013 Tingkat Kabupaten/Kota yang kompeten dan siap untuk ditugaskan pada bimbingan teknis guru sasaran dan pendampingan di sekolah sasaran. Target fisik kegiatan ini adalah 360 orang peserta dengan alokasi dana sebesar Rp.470.468.000,-

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,58%.

Kendala yang dihadapi adalah beberapa peserta yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berhalangan hadir karena melaksanakan ibadah umroh sehingga digantikan oleh peserta lain yang telah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 dan kurangnya durasi waktu yang tersedia membuat kegiatan menjadi kurang efektif.

Untuk mengatasi hal tersebut, LPMP Riau melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dalam penggantian peserta dan mengusulkan agar kegiatan selanjutnya memperhatikan alokasi waktu sehingga kegiatan dapat berjalan lebih efektif.

2) Asistensi dan Bantuan Pemerintah (053)

a. Asistensi Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013

Asistensi Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang proses dan substansi pendampingan Kurikulum 2013, pembuatan proposal bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013, pembuatan RAB bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013, memberikan pemahaman tentang penyusunan laporan kegiatan dan laporan keuangan bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013, penandatanganan Surat Perjanjian

Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 dan penandatanganan kuitansi penerimaan dana bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013. Peserta kegiatan ini adalah unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepala sekolah dan bendahara sekolah induk klaster dengan target fisik 812 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 946.886.000,-.

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 99,88% dan realisasi keuangan sebesar 99,38%. Capaian realisasi fisik dan keuangan tersebut disebabkan oleh ketidakhadiran peserta sebanyak 1 (satu) orang karena SDM di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi sehingga hanya 1 (satu) orang yang bisa hadir.

Kendala yang dihadapi adalah:

1. Beberapa peserta yang hadir tidak sesuai kriteria sehingga banyak peserta yang mengalami kesulitan dalam pembuatan proposal dan pembuatan RAB kegiatan pendampingan
2. Kurang pahamnya peserta terhadap peraturan keuangan yang berlaku sehingga menyulitkan peserta dalam pembuatan RAB.
3. Kepala Sekolah yang berhalangan hadir tidak bisa menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang dilaksanakan antara lain:

1. Memberikan materi baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy agar peserta dapat lebih memahami substansi dari pendampingan Kurikulum.

2. Memberikan pemahaman tentang peraturan keuangan yang berlaku dan memandu dalam pembuatan RAB.
3. Mengirimkan berkas Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 kepada sekolah induk klaster yang tidak hadir pada kegiatan asistensi dan dikirimkan kembali ke LPMP Riau

b. Bantuan Pemerintah

Tujuan kegiatan ini adalah menyalurkan dana bantuan pemerintah pendampingan sekolah pelaksana Kurikulum 2013 ke semua sekolah induk klaster. Target fisik dari kegiatan ini adalah 1455 sekolah yang disalurkan melalui 400 sekolah induk klaster dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.674.500.000,-

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%.

Kendala yang dihadapi adalah beberapa sekolah induk klaster penerima dana bantuan pendampingan memiliki rekening yang bermasalah di sistem SPAN KPPN sehingga menghambat proses penyaluran dana bantuan pendampingan.

Untuk mengatasi hal tersebut, LPMP Riau memastikan kepada sekolah induk klaster penerima dana bantuan pemerintah agar memberikan data rekening yang masih aktif dan membuat rekening baru bagi sekolah induk klaster yang rekeningnya bermasalah.

c. Workshop/Asistensi Penyusunan Laporan Bantuan Pemerintah Pendampingan K-13 Jenjang SD

Kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk memeriksa dan memberikan asistensi dalam penyusunan laporan kegiatan pendampingan Kurikulum 2013 sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pendampingan Kurikulum 2013 serta memeriksa dan memberikan asistensi dalam

penyusunan laporan keuangan pendampingan Kurikulum 2013 sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pendampingan Kurikulum 2013. Target Fisik dari kegiatan ini adalah 800 orang dengan alokasi keuangan sebesar Rp. 903.560.000,-.

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 99,25% dan realisasi keuangan sebesar Rp 876.886.700,- (97,05%).

Kendala yang dihadapi adalah peserta kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan pendampingan yang di utus oleh sekolah selalu berubah-ubah, sehingga informasi yang diperoleh tidak utuh. Hal ini mengakibatkan sekolah induk klaster mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan pendampingan.

Untuk mengatasi hal tersebut, LPMP Riau menghimbau kepada Dinas Pendidikan dan Sekolah agar mengirimkan peserta sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak berubah-ubah

b. SMP Yang Melaksanakan Kurikulum 2013 (5630.006.002)

1) Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 (051)

a. Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Propinsi (IP) Kurikulum 2013 Jenjang SMP

Memberikan penyegaran kepada Instruktur Propinsi (IP) jenjang SMP sehingga menghasilkan IP yang kompeten dan siap untuk menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kabupaten/Kota Jenjang SMP serta sebagai tim pendamping pelaksanaan pendampingan di sekolah penyelenggaran K13 dengan target fisik 23 orang. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 98,76% atau Rp 27.751.50,- dari alokasi anggaran sebesar Rp 28.099.000,-

Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan waktu pelaksanaan penyegaran yang hanya 20 jam pelajaran sementara antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan sangat tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para peserta dan narasumber membuat forum diskusi di luar pelaksanaan kegiatan untuk membahas hal-hal lain terkait perkembangan Kurikulum 2013.

b. Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kabupaten (IK) Kurikulum 2013 Jenjang SMP

Tujuan Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kabupaten (IK) Kurikulum 2013 Jenjang SMP adalah untuk menghasilkan Instruktur Kurikulum 2013 Tingkat Kabupaten/Kota yang kompeten dan siap untuk ditugaskan pada bimbingan teknis guru sasaran dan pendampingan di sekolah sasaran. Target fisik kegiatan ini adalah 274 orang peserta dengan alokasi dana sebesar Rp.555.458.000,-

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 554.302.201,- (99,58%).

Kendala yang dihadapi adalah :

1. Pada saat pemilihan calon peserta yang akan mengikuti penyegaran.
Keterbatasan kuota untuk peserta yang tidak sesuai dengan jumlah instruktur Kabupaten/Kota yang tersedia mengakibatkan kesulitan dalam pemilihan calon peserta penyegaran.
2. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang hanya 20 jam pelajaran sementara antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan sangat tinggi.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. LPMP Riau berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pemilihan calon peserta dimana peserta bimbingan teknis penyegaran instruktur Kurikulum 2013 diutamakan yang berasal dari sekolah pelaksana Kurikulum 2013 tahun 2017 dan 2016 atau guru sasaran tahun 2017.

2. Peserta dan narasumber membuat forum diskusi di luar pelaksanaan kegiatan untuk membahas hal-hal lain terkait perkembangan Kurikulum 2013.

2) Asistensi dan Bantuan Pemerintah (053)

a. Asistensi Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013

Asistensi Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang proses dan substansi pendampingan Kurikulum 2013, pembuatan proposal bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013, pembuatan RAB bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013, memberikan pemahaman tentang penyusunan laporan kegiatan dan laporan keuangan bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013, penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 dan penandatanganan kuitansi penerimaan dana bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013. Peserta kegiatan ini adalah unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepala sekolah dan bendahara sekolah induk klaster dengan target fisik 292 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 330.396.000,-.

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 98,29% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 329.581.800,- (99,75%).

Capaian realisasi fisik dan keuangan tersebut disebabkan oleh ketidakhadiran peserta sebanyak 5 (lima) orang karena letak sekolah yang jauh dan susahna transportasi ke tempat kegiatan.

Kendala yang dihadapi adalah:

1. Beberapa peserta yang hadir kurang fokus mengikuti kegiatan sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman peserta terhadap substansi dari pendampingan.
2. Kurang pahamnya peserta terhadap peraturan keuangan yang berlaku sehingga menyulitkan peserta dalam pembuatan RAB.
3. Kepala Sekolah yang berhalangan hadir tidak bisa menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang dilaksanakan antara lain:

1. Memberikan materi baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy agar peserta dapat lebih memahami substansi dari pendampingan Kurikulum.
2. Memberikan pemahaman tentang peraturan keuangan yang berlaku dan memandu dalam pembuatan RAB.
3. Mengirimkan berkas Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 kepada sekolah induk klaster yang tidak hadir pada kegiatan asistensi dan dikirimkan kembali ke LPMP Riau.

b. Bantuan Pemerintah

Tujuan kegiatan ini adalah menyalurkan dana bantuan pemerintah pendampingan sekolah pelaksana Kurikulum 2013 ke semua sekolah induk klaster. Target fisik dari kegiatan ini adalah 458 sekolah yang disalurkan melalui 140 sekolah induk klaster dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.748.000.000,-

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%.

Kendala yang dihadapi adalah beberapa sekolah induk klaster penerima dana bantuan pendampingan memiliki rekening yang bermasalah di sistem SPAN KPPN sehingga menghambat proses penyaluran dana bantuan pendampingan.

Untuk mengatasi hal tersebut, LPMP Riau memastikan kepada sekolah induk klaster penerima dana bantuan pemerintah agar memberikan data rekening yang masih aktif dan membuat rekening baru bagi sekolah induk klaster yang rekeningnya bermasalah.

c. Asistensi Penyusunan Laporan Bantuan Pemerintah Pendampingan K-13 Jenjang SMP

Kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk memeriksa dan memberikan asistensi dalam penyusunan laporan kegiatan pendampingan Kurikulum 2013 sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pendampingan Kurikulum 2013 serta memeriksa dan memberikan asistensi dalam penyusunan laporan keuangan pendampingan Kurikulum 2013 sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pendampingan Kurikulum 2013. Target Fisik dari kegiatan ini adalah 272 orang dengan alokasi keuangan sebesar Rp. 92.376.000,-.

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 98,9% dan realisasi keuangan sebesar Rp 90.959.200,- (98,47%).

Kendala yang dihadapi adalah peserta kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan pendampingan yang di utus oleh sekolah selalu berubah-ubah, sehingga informasi yang diperoleh tidak utuh. Hal ini mengakibatkan sekolah induk klaster mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan pendampingan.

Untuk mengatasi hal tersebut, LPMP Riau menghimbau kepada Dinas Pendidikan dan Sekolah agar mengirimkan peserta sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak berubah-ubah

c. SMA Yang Melaksanakan Kurikulum 2013 (5630.006.003)

1) Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 (051)

a. Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Propinsi (IP) Kurikulum 2013 Jenjang SMA/SMK

Memberikan penyegaran kepada Instruktur Propinsi (IP) jenjang SMP sehingga menghasilkan IP yang kompeten dan siap untuk menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kabupaten/Kota Jenjang SMA/SMK serta sebagai tim pendamping pelaksanaan pendampingan di sekolah penyelenggaraan K13 dengan target fisik 12 orang. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 96,38% atau Rp 22.885.800,- dari alokasi anggaran sebesar Rp 23.746.000,-

Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan waktu pelaksanaan penyegaran yang hanya 20 jam pelajaran sementara antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan sangat tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para peserta dan narasumber membuat forum diskusi di luar pelaksanaan kegiatan untuk membahas hal-hal lain terkait perkembangan Kurikulum 2013.

b. Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kabupaten (IK) Kurikulum 2013 Jenjang SMA

Tujuan Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kabupaten (IK) Kurikulum 2013 Jenjang SMA adalah untuk menghasilkan Instruktur Kurikulum 2013 Tingkat Kabupaten/Kota yang kompeten dan siap untuk ditugaskan pada bimbingan teknis guru sasaran dan pendampingan di sekolah sasaran. Target fisik kegiatan ini adalah 243 orang peserta dengan alokasi dana sebesar Rp.315.419.000,-

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 98,35% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 313.602.500,- (99,42%).

Kendala yang dihadapi adalah, beberapa peserta yang di nilai oleh LPMP Riau bisa dan mampu untuk menjadi IK, ternyata pada saat bersamaan sedang mengikuti kegiatan lain, di samping itu beberapa peserta yang diundang tidak bisa hadir, sehingga di gantikan oleh peserta lain yang sudah pernah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 tahun sebelumnya.

Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan koordinasi yang intensif kepada pihak Dinas Pendidikan dan pihak sekolah untuk memastikan kemampuan dan kehadiran peserta yang akan diundang.

2) Asistensi dan Bantuan Pemerintah (053)

1. Asistensi Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013

Asistensi Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang proses dan substansi pendampingan Kurikulum 2013, pembuatan proposal bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013, pembuatan RAB bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013, memberikan pemahaman tentang penyusunan laporan kegiatan dan laporan keuangan bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013, penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 dan penandatanganan kuitansi penerimaan dana bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013. Peserta kegiatan ini adalah unsur Dinas Pendidikan Propinsi, kepala sekolah dan bendahara sekolah induk klaster dengan target fisik 102 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 121.220.000,-

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 95,10% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 121.123.500,- (99,92%).

Capaian realisasi fisik dan keuangan tersebut disebabkan oleh ketidakhadiran peserta sebanyak 5 (lima) orang dari unsur Dinas Pendidikan Propinsi karena kegiatan di daerah yang berbarengan dengan kegiatan tersebut.

Kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Sebagian besar unsur Dinas Pendidikan tidak hadir dalam kegiatan, sehingga sekolah induk klaster mengalami kesulitan dalam koordinasi masalah pendampingan di kabupaten/kota masing-masing;
2. Peserta yang hadir tidak sesuai kriteria sehingga kesulitan dalam membuat proposal dan RAB.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilaksanakan beberapa hal:

1. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi mengenai masalah pendampingan Kurikulum 2013;
2. Memandu peserta dalam pembuatan proposal dan RAB.

3. Bantuan Pemerintah

Tujuan kegiatan ini adalah menyalurkan dana bantuan pemerintah pendampingan sekolah pelaksana Kurikulum 2013 ke semua sekolah induk klaster. Target fisik dari kegiatan ini adalah 159 sekolah yang disalurkan melalui 45 sekolah induk klaster dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.272.000.000,-

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%.

Kendala yang dihadapi adalah beberapa sekolah induk klaster penerima dana bantuan pendampingan memiliki rekening yang bermasalah di

sistem SPAN KPPN sehingga menghambat proses penyaluran dana bantuan pendampingan.

Untuk mengatasi hal tersebut, LPMP Riau memastikan kepada sekolah induk klaster penerima dana bantuan pemerintah agar memberikan data rekening yang masih aktif dan membuat rekening baru bagi sekolah induk klaster yang rekeningnya bermasalah

4. Asistensi Penyusunan Laporan Bantuan Pemerintah Pendampingan K-13 Jenjang SMA

Kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk memeriksa dan memberikan asistensi dalam penyusunan laporan kegiatan pendampingan Kurikulum 2013 sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pendampingan Kurikulum 2013 serta memeriksa dan memberikan asistensi dalam penyusunan laporan keuangan pendampingan Kurikulum 2013 sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pendampingan Kurikulum 2013. Target Fisik dari kegiatan ini adalah 90 orang dengan alokasi keuangan sebesar Rp. 50.296.000,-.

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp 48.455.000,- (96,34%)

Kendala yang dihadapi adalah peserta kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan pendampingan yang di utus oleh sekolah selalu berubah-ubah, sehingga informasi yang diperoleh tidak utuh. Hal ini mengakibatkan sekolah induk klaster mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan pendampingan.

Untuk mengatasi hal tersebut, LPMP Riau menghimbau kepada Dinas Pendidikan dan Sekolah agar mengirimkan peserta sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak berubah-ubah

d. SMK Yang Melaksanakan Kurikulum 2013 (560.006.004)

1) Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 (051)

a. Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kabupaten (IK) Kurikulum 2013 Jenjang SMK

Tujuan Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kabupaten (IK) Kurikulum 2013 Jenjang SMK adalah untuk menghasilkan Instruktur Kurikulum 2013 Tingkat Kabupaten/Kota yang kompeten dan siap untuk ditugaskan pada bimbingan teknis guru sasaran dan pendampingan di sekolah sasaran. Target fisik kegiatan ini adalah 150 orang peserta dengan alokasi dana sebesar Rp.319.260.000,-

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 318.637.300,- (99,8%).

Kendala yang dihadapi adalah, beberapa peserta yang di nilai oleh LPMP Riau bisa dan mampu untuk menjadi IK, ternyata pada saat bersamaan sedang mengikuti kegiatan lain, di samping itu beberapa peserta yang diundang tidak bisa hadir, sehingga di gantikan oleh peserta lain yang sudah pernah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 tahun sebelumnya.

Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan koordinasi yang intensif kepada pihak Dinas Pendidikan dan pihak sekolah untuk memastikan kemampuan dan kehadiran peserta yang akan diundang

2) Asistensi dan Bantuan Pemerintah (053)

a. Asistensi Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013

Asistensi Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang proses dan substansi pendampingan Kurikulum 2013, pembuatan proposal bantuan pemerintah

pendampingan Kurikulum 2013, pembuatan RAB bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013, memberikan pemahaman tentang penyusunan laporan kegiatan dan laporan keuangan bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013, penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 dan penandatanganan kuitansi penerimaan dana bantuan pemerintah pendampingan Kurikulum 2013. Peserta kegiatan ini adalah unsur Dinas Pendidikan Propinsi, kepala sekolah dan bendahara sekolah induk klaster dengan target fisik 91 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 104.552.000,-.

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 104.430.700,- (99,88%).

Kendala yang dihadapi adalah:

1. Beberapa peserta yang hadir kurang fokus mengikuti kegiatan sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman peserta terhadap substansi dari pendampingan.
2. Kurang pahamnya peserta terhadap peraturan keuangan yang berlaku sehingga menyulitkan peserta dalam pembuatan RAB.
3. Kepala Sekolah yang berhalangan hadir tidak bisa menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang dilaksanakan antara lain:

1. Memberikan materi baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* agar peserta dapat lebih memahami substansi dari pendampingan Kurikulum.
2. Memberikan pemahaman tentang peraturan keuangan yang berlaku dan memandu dalam pembuatan RAB.
3. Mengirimkan berkas Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 kepada sekolah induk klaster yang tidak hadir pada kegiatan asistensi dan dikirimkan kembali ke LPMP Riau

b. Bantuan Pemerintah

Tujuan kegiatan ini adalah menyalurkan dana bantuan pemerintah pendampingan sekolah pelaksana Kurikulum 2013 ke semua sekolah induk klaster. Target fisik dari kegiatan ini adalah 112 sekolah yang disalurkan melalui 40 sekolah induk klaster dengan alokasi dana sebesar Rp. 896.000.000,-

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%.

Kendala yang dihadapi adalah beberapa sekolah induk klaster penerima dana bantuan pendampingan memiliki rekening yang bermasalah di sistem SPAN KPPN sehingga menghambat proses penyaluran dana bantuan pendampingan.

Untuk mengatasi hal tersebut, LPMP Riau memastikan kepada sekolah induk klaster penerima dana bantuan pemerintah agar memberikan data rekening yang masih aktif dan membuat rekening baru bagi sekolah induk klaster yang rekeningnya bermasalah

c. Asistensi Penyusunan Laporan Bantuan Pemerintah Pendampingan K-13 Jenjang SMP

Kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk memeriksa dan memberikan asistensi dalam penyusunan laporan kegiatan pendampingan Kurikulum 2013 sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pendampingan Kurikulum 2013 serta memeriksa dan memberikan asistensi dalam penyusunan laporan keuangan pendampingan Kurikulum 2013 sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pendampingan Kurikulum 2013. Target Fisik dari kegiatan ini adalah 80 orang dengan alokasi keuangan sebesar Rp. 56.124.000,-.

Dari target fisik dan keuangan diatas, capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp 52.047.500,- (92,74%).

Kendala yang dihadapi adalah peserta kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan pendampingan yang di utus oleh sekolah selalu berubah-ubah, sehingga informasi yang diperoleh tidak utuh. Hal ini mengakibatkan sekolah induk klaster mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan pendampingan.

Untuk mengatasi hal tersebut, LPMP Riau menghimbau kepada Dinas Pendidikan dan Sekolah agar mengirimkan peserta sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak berubah-ubah

4. *Layanan Internal (5630.951)*

a. **Pengadaan Kendaraan Bermotor (995)**

Terlaksananya pengadaan kendaraan bermotor, terdiri dari:

1. Roda 4 sebanyak 1 unit. Realisasi keuangan sebesar 98,6% atau Rp.255.519.500,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 259.113.000,-
2. Roda 3 sebanyak 1 unit. Realisasi keuangan sebesar 96,9% atau Rp. 35.870.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 37.000.000,-

Dari 2 pengadaan kendaraan bermotor di atas, realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 98,4% atau Rp. 291.389.500,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 296.113.000,-. Hal ini terjadi karena adanya efisiensi harga.

Dari seluruh pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan kendaraan roda 2 tidak dapat dilaksanakan, karena dana untuk pengadaan tersebut terblokir. Sehingga dari seluruh pengadaan kendaraan bermotor tidak tercapai secara fisik 100% dan keuangan juga tidak 100%. Tidak tercapainya pengadaan kendaraan bermotor disebabkan adanya dana yang diblokir sebesar Rp. 291.135.000,-

b. Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi (996)

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi meliputi;

- a. Pengadaan projector sebanyak 1 unit. Realisasi keuangan sebesar 81,8% atau Rp. 20.000.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 24.451.000,-
- b. Pengadaan PC Unit sebanyak 30 unit. Realisasi keuangan sebesar 99,5% atau Rp. 435.690.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 438.000.000,-
- c. Pengadaan Printer All In One sebanyak 13 unit. Realisasi keuangan sebesar 96,8% atau Rp. 73.001.500,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 75.400.000,-
- d. Pengadaan CCTV sebanyak 1 Paket. Realisasi keuangan sebesar 93,5% atau Rp. 91.135.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 97.500.000,-
- e. Pengadaan Sound System Gedung Utama sebanyak 1 Paket. Realisasi keuangan sebesar 97,3% atau Rp. 124.058.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 127.462.000,-
- f. Pengadaan Sound System Outdoor sebanyak 1 Paket. Realisasi keuangan sebesar 97,4% atau Rp. 189.643.300,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 194.700.000,-

Dari keseluruhan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar 97,5% atau Rp. 933.527.800,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 957.513.000,- hal ini disebabkan karena terjadinya efisiensi harga.

c. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (997)

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran meliputi;

- a. Pengadaan Lukisan sebanyak 50 unit. Realisasi keuangan sebesar 67,2% atau Rp. 15.125.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 22.500.000,-

- b. Pengadaan Mesin Potong Rumput sebanyak 3 unit. Realisasi keuangan sebesar 96,3% atau Rp. 15.600.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 16.200.000,-
- c. Pengadaan Pemotong Kertas sebanyak 6 unit. Realisasi keuangan sebesar 88,2% atau Rp. 14.551.200,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 16.500.000,-
- d. Pengadaan Mesin Penghancur Kertas sebanyak 10 Unit. Realisasi keuangan sebesar 94,8% atau Rp. 65.432.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 69.000.000,-
- e. Pengadaan Mesin Laminating sebanyak 2 Unit. Realisasi keuangan sebesar 93,8% atau Rp. 15.000.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 16.000.000,-
- f. Pengadaan Papan Flipchart sebanyak 15 Unit. Realisasi keuangan sebesar 95,0% atau Rp. 28.500.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-
- g. Pengadaan Tong Sampah Stainless sebanyak 100 Unit. Realisasi keuangan sebesar 97,4% atau Rp. 97.350.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-
- h. Pengadaan Peralatan Fitnes sebanyak 10 Unit. Realisasi keuangan sebesar 98,4% atau Rp. 85.195.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 86.600.000,-
- i. Pengadaan Mesin Cuci sebanyak 4 Unit. Realisasi keuangan sebesar 91,3% atau Rp. 109.560.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,-
- j. Pengadaan Selimut sebanyak 400 Set. Realisasi keuangan sebesar 90,2% atau Rp. 288.628.560,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 320.000.000,-
- k. Pengadaan Kursi Tamu sebanyak 8 Unit. Realisasi keuangan sebesar 88,6% atau Rp. 106.348.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,-
- l. Pengadaan Standing Mic sebanyak 30 Unit. Realisasi keuangan sebesar 93,8% atau Rp. 7.500.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.000.000,-
- m. Pengadaan Lemari Asrama sebanyak 49 Unit. Realisasi keuangan sebesar 88,8% atau Rp. 605.038.126,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 681.100.000,-
- n. Pengadaan Lemari Arsip sebanyak 20 Unit. Realisasi keuangan sebesar 99,6% atau Rp. 199.166.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-

- o. Pengadaan Air Curtain sebanyak 12 Unit. Realisasi keuangan sebesar 90,6% atau Rp. 108.666.800,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,-

Dari keseluruhan pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar 91,5% atau Rp. 1.761.660.686,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.925.900.000,-

d. Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan (998)

Pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan meliputi:

- a. Pembuatan Jalan Lingkungan dan Lapangan Parkir 650 m². Realisasi keuangan sebesar 88,3% atau Rp. 264.408.574,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 299.608.000,-
- b. Pekerjaan Lantai Dasar dan Atap Lapangan Badminton 180 m². Realisasi keuangan sebesar 87,7% atau Rp. 434.038.450,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 495.080.000,-
- c. Pekerjaan Rehabilitasi Dapur 2 Lantai 355 m². Realisasi keuangan sebesar 90,9 atau Rp. 1.520.834.225,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.673.250.000,-
- d. Pekerjaan Rehabilitasi Atap Selasar 345 m². Realisasi keuangan sebesar 39,0 atau Rp. 254.589.386,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 652.500.000,-
- e. Pekerjaan Rehabilitasi Laboratorium IPA dan IPS (Menjadi Ruang Kelas) 2 Lantai 981 m². Realisasi keuangan sebesar 90,4% atau Rp. 5.124.736.250,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.670.440.000,-
- f. Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Utama 722 m². Realisasi keuangan sebesar 90,4% atau Rp. 279.060.127,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 308.841.000,-
- g. Pekerjaan Rehabilitasi Mushalla 2 lantai 294 m². Realisasi keuangan sebesar 87,3% atau Rp. 1.509.709.657,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.728.800.000,-

- h. Pekerjaan Rehabilitasi Pagar Depan dan Samping 162 m¹. Realisasi keuangan sebesar 84,2% atau Rp. 263.033.602,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 312.480.000,-
- i. Pekerjaan Penggantian Instalasi Listrik. Realisasi keuangan sebesar 94,4% atau Rp. 366.589.950,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 388.510.000,-

Dari keseluruhan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan, realisasi fisik 83,3%, realisasi Fisik tidak tercapai secara keseluruhan, karena terdapat pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh penyedia. Yaitu Pekerjaan Rehabilitasi Atap Selasar. Sedangkan pekerjaan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan selain pekerjaan Rehabilitasi Atap Selasar tercapai 100%.

Realisasi keuangan sebesar 86,9% atau Rp. 10.017.000.221,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 11.529.509.000,-. Realisasi keuangan tidak tercapai secara keseluruhan, terjadi karena:

1. Terdapat pekerjaan yang tidak diselesaikan 100%, hanya mencapai bobot 31,42%, sehingga pembayaran dilakukan hanya sesuai progres pekerjaan yang dilaksanakan, yaitu pekerjaan Rehabilitasi Atap Selasar;
2. Terdapat efisiensi harga setiap pekerjaan dari alokasi anggaran keseluruhan, yaitu dari penawaran penyedia dan negosiasi harga dengan penyedia.

5. *Layanan Perkantoran (5630.994)*

a. Gaji dan Tunjangan (001)

Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dan karyawan LPMP Riau dengan realisasi keuangan sebesar .99,97% atau Rp. 8.417.475.514,- dari alokasi keuangan sebesar Rp. 8.420.012.000,-

b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002)

Terlaksananya pembayaran operasional dan pemeliharaan kantor dengan realisasi keuangan sebesar 91,46 % atau Rp. 5.148.107.583,- dari alokasi keuangan sebesar Rp. 5.629.092.000,-

B. Evaluasi daya serap anggaran terhadap Perjanjian kinerja

Pada tahun 2018 seluruh unit kerja di lingkungan Dirjen Dikdasmen telah melakukan Perjanjian kinerja antara Kepala LPMP dengan Dirjen Dikdasmen, dan salah satunya adalah daya serap anggaran sesuai dengan kurva normal daya serap anggaran seperti yang targetkan dalam kontrak kerja. Berikut capaian daya serap anggaran LPMP Riau sampai 31 desember 2018 seperti terlihat dalam diagram berikut.

Grafik 3.2 Perkembangan serapan anggaran tahun 2018 LPMP Riau



Dari grafik perkembangan serapan anggaran tahun 2018, berdasarkan kondisi capaian antara realisasi dengan harapan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja LPMP Riau tahun 2018, sampai dengan bulan Desember capaian realisasi penggunaan anggaran/daya serap anggaran tidak mencapai dari target yang telah direncanakan, hal ini disebabkan ada rehabilitasi fisik/ gedung yang tidak selesai pengerjaannya dan efisiensi harga.

Akuntabilitas capaian penggunaan anggaran LPMP Riau Tahun 2018 terlihat bahwa capaian serapan sebesar 94,6% dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 48.326.857.056,-(empat puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan nratu lima puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah) dari alokasi anggaran sebesar Rp 51.077.824.000,-(lima puluh satu milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja LPMP Riau tahun 2018 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan LPMP Riau kepada semua elemen masyarakat yang menjadi stakeholders dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Riau selama tahun 2018

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya LPMP Riau Tahun Anggaran 2018 melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan di Wilayah Provinsi Riau yang tergambar dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) LPMP Riau Tahun Anggaran 2018,

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPMP) Riau tahun Anggaran 2018 sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan yang direncanakan walau ada perubahan-perubahan yang bertujuan untuk memaksimalkan kegiatan dalam rangka tercapainya out put Program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Kontrak Kinerja lembaga dengan Kementerian dalam hal ini dengan Dirjen Dikdasmen. Hal ini dapat menggambarkan dalam capaian sasaran kegiatan mencapai 99,9 % dan realisasi serapan keuangan 94,6 %.

B. Saran

1. Agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan lebih cepat dan maksimal diawal tahun sebaiknya juknis kegiatan dari pusat lebih awal diberikan kepada LPMP.
2. Pembukaan blokir anggaran sebaiknya tidak di semester 2, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan lebih baik dan lebih cepat.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan atau *stakeholder* agar kegiatan lebih terlaksana dengan baik dan maksimal baik kuantitas maupun kualitas.

4. Perlunya dukungan dan kerjasama seluruh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan dapat berjalan lebih baik.